



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 30 Agustus 2016 No. 69

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)**

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : Drs.OKTAVIANUS BERDIKARIANTO, M.T. |
| 2. Jabatan | : DIREKTUR - KEUANGAN DAN ADMINISTRASI - PT KAI COMMUTER JABODETABEK |
| 3. NIK | : 117459 |
| 4. Alamat Kantor | : Jl. IR. H. JUANDA I NO. 1, JAKARTA PUSAT |
| 5. Tanggal Pelaporan | : 30 Oktober 2012, 11 Maret 2016 |

Status Laporan

II. DATA HARTA

**A. HARTA TIDAK BERGERAK
(TANAH DAN BANGUNAN)**

	30 Oktober 2012	11 Maret 2016
	Rp. 270.536.000	Rp. 270.536.000
1. Tanah & Bangunan seluas 120 m2 & 21 m2, di Kabupaten BANDUNG, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2007 sampai dengan 2009	Rp. 50.015.000	Rp. 50.015.000
2. Tanah seluas 1.938 m2, di Kabupaten GARUT, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2008 sampai dengan 2009	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000

	30 Oktober 2012	11 Maret 2016
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA	Rp. 14.623.874	Rp. 280.662.613
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI (Penambahan Data Harta Kekayaan, Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 14.623.874	Rp. 280.662.613
E. PIUTANG	Rp. 0	Rp. 0
TOTAL HARTA (II)	Rp. 982.398.874	Rp. 1.248.437.613

III. HUTANG	Rp. 633.239.000	Rp. 933.239.000
1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN UANG (Penambahan Hutang baru)	Rp. 367.739.000	Rp. 667.739.000
2. Hutang dalam bentuk PINJAMAN BARANG	Rp. 245.500.000	Rp. 245.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III)	Rp. 349.159.874	Rp. 315.198.613

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis

